

EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN TERPADU ADMINDUK (LANTERA) DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022-2024

Oleh: Muhammad Arif Muliawan
Pembimbing: M. Rafi, S.I.P., M.I.P.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Binawidya Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Layanan Terpadu Adminduk (Lanter) dalam pelayanan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2024. Program Lantera diinisiasi sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Lantera telah memberikan dampak positif dalam mempercepat perekaman dan pencetakan e-KTP, yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah wajib e-KTP yang belum terpenuhi dari tahun ke tahun: 10.676 (2022), 7.416 (2023), menjadi 4.852 (2024). Tingkat kepemilikan e-KTP juga mengalami peningkatan dari 95,70% (2022) menjadi 97,10% (2023), dan 98,17% (2024). Meskipun demikian, program ini belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala seperti keterbatasan jaringan, pemahaman masyarakat yang rendah terhadap prosedur, dan waktu pelayanan yang belum konsisten. Secara umum, program Lantera dapat dikatakan cukup efektif dalam mencapai tujuan meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Lantera, e-KTP, Administrasi Kependudukan.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of the Integrated Population Administration Service Program (Lanter) in providing e-KTP services in Kuantan Singingi Regency in 2022-2024. The Lantera program was initiated as an innovation to improve access to population administration services, particularly for residents in remote areas. A descriptive method with a qualitative approach was used. Data were collected through interviews, observations, and documentation using purposive sampling techniques.

The findings indicate that the Lantera program has had a positive impact in accelerating the recording and issuance of e-KTPs, as evidenced by a decrease in the number of unfulfilled e-KTP obligations from year to year: 10,676 (2022), 7,416 (2023), and 4,852 (2024). The e-KTP ownership rate also increased from 95.70% (2022) to 97.10% (2023), and further to 98.17% (2024). However, the program has not yet reached full optimization due to challenges such as limited network access, low public understanding of procedures, and inconsistent service hours. Overall, the Lantera program can be considered fairly effective in achieving its goal of expanding the coverage of population administration services.

Keywords: Program Effectiveness, Lantera, e-KTP, Population Administration.

A. Latar Belakang Masalah

Konsep dasar otonomi daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai semangat pembaharuan dan reformasi, guna meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan sebagaimana potensi serta keanekaragaman. Penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah terlepas dari peran para aparatur negara sebagai pelaksananya. Aparatur Negara tersebut tentunya yang memiliki kompetensi, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara atau abdi masyarakat yang harus melayani masyarakat dalam urusan pemerintahan (Osborne & Plastrik, 2001).

Penyelenggaraan pemerintahan akhir ini telah bergeser ke arah desentralisasi yang lebih kuat, lebih luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional serta lebih efektif dan efisien, seiring dengan digulirkannya semangat reformasi di segala bidang (Azikin, 2018).

Undang-Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Anis et al., 2021). Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik yang menyangkut masyarakat luas patut disoroti, karena pelayanan yang diberikan haruslah berkualitas selain memenuhi tuntutan tetapi juga untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat terhadap jasa publik (Aini & Rachman, 2020).

Demi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan, sejak September 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memberikan terobosan melalui inovasi terhadap pelayanan yang diberikan guna tercapainya pelayanan yang optimal.

Inovasi pelayanan tersebut diberi nama dengan Layanan Terpadu Adminduk (Lanter). Program Lantera dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bentuk inovasi layanan adminduk yang berbasis jemput bola, didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Selain itu, program ini muncul sebagai respon terhadap kondisi geografis wilayah dan masih rendahnya cakupan kepemilikan e-KTP, serta diperkuat dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 801/Disdukcapil/2021/21 tentang Penetapan Program Layanan Terpadu Adminduk (Lanter). Program ini nantinya petugas Dukcapil akan jemput bola atau turun langsung ke seluruh kecamatan yang ada di Kuantan Singingi, dan masyarakat dapat mencetak langsung dokumen kependudukan yang dibutuhkan di lokasi pelayanan. Inovasi pelayanan ini dilaksanakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan KTP, mulai dari pencatatan biodata penduduk hingga penerbitan dokumen kependudukan. Program ini dijalankan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan, salah satunya kesulitan dalam mengakses pelayanan. Berikut ini data wajib e-KTP tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1. Jumlah penduduk wajib e-KTP Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Wajib e-KTP
1.	2022	248.334
2.	2023	256.035
3.	2024	264.987

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi

Jumlah penduduk wajib e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2022 jumlah penduduk wajib e-KTP tercatat sebanyak 248.334 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 256.035 jiwa pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 264.987 jiwa. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk usia wajib KTP yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berikut ini jumlah kepemilikan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2 Jumlah kepemilikan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024

No	Tahun	Sudah memiliki e-KTP (jiwa)
1.	2022	237.658
2.	2023	248.619
3.	2024	260.135

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi*

Berdasarkan Tabel 2, jumlah penduduk yang telah memiliki e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, sebanyak 237.658 jiwa telah memiliki e-KTP. Jumlah ini meningkat menjadi 248.619 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 260.135 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kependudukan, khususnya dalam hal kepemilikan e-KTP, terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022 persentase kepemilikan e-KTP sebesar 95,70%, sementara pada tahun 2023 sebesar 97,10%. Terjadi peningkatan sebesar 1,40% dalam kurun waktu satu tahun tersebut. angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sebesar 98,25%. Pada tahun 2024, kepemilikan e-KTP mencapai 260.135 jiwa dari total wajib e-KTP sebanyak 264.987 jiwa. Secara persentase jumlah ini sebesar 98,17% dari total wajib e-KTP, terjadi kenaikan persentase dibanding tahun 2023, yakni sebesar 97,10%. Jumlah

ini sedikit lagi untuk mencapai target kepemilikan e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sebesar 98,25%. Target tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil atau memiliki kendala administratif. Namun demikian, capaian 98,17% ini merupakan indikator positif bahwa program pelayanan administrasi kependudukan telah bergerak ke arah yang lebih efektif. Diperlukan strategi lanjutan, seperti peningkatan sosialisasi, layanan bergerak yang lebih intensif, serta pemutakhiran data secara rutin, agar sisa penduduk yang belum memiliki e-KTP dapat segera terlayani dan target nasional dapat tercapai secara maksimal.

Tren positif ini juga menunjukkan keberhasilan program dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk di wilayah yang sebelumnya memiliki kendala akses pelayanan. Penurunan angka penduduk yang belum melakukan perekaman, meskipun relatif kecil, memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendekatan aktif melalui strategi jemput bola atau turun langsung ke lapangan telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, kemajuan ini memperkuat pondasi pelayanan administrasi yang lebih transparan, akurat, dan terintegrasi ke depannya. Dengan demikian, peningkatan kepemilikan e-KTP bukan hanya mencerminkan keberhasilan jangka pendek, tetapi juga menjadi indikator penting bagi keberlanjutan pelayanan publik yang responsif dan inklusif.

Sebelum program ini diterapkan, masyarakat di daerah pedesaan, terpencil, atau wilayah dengan geografis sulit, sering mengalami hambatan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di pusat kota, jaraknya bisa sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat. Akibatnya, warga harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit.

Gambar 1. Pelayanan Program Lantera



Sumber: Website Potretnews.com

Berdasarkan gambar tersebut dijelaskan bahwa program ini memungkinkan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan langsung di desa-desa, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil di pusat kota. Pelayanan yang berbentuk jemput bola ini dapat memperpendek jarak layanan, meminimalisir hambatan geografis, serta mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. Ini menjadi bukti nyata bahwa program Lantera tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga merespons langsung kebutuhan riil masyarakat, yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, Lantera berkontribusi besar dalam menjawab persoalan aksesibilitas dan membuktikan efektivitas program dari sisi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi karena daerah ini memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks, dengan banyak wilayah pedesaan dan terpencil yang sulit dijangkau. Meskipun ada kabupaten lain dengan kondisi geografis yang lebih menantang, namun Kuantan Singingi dipilih karena telah secara aktif mengimplementasikan program Lantera sebagai inovasi layanan kependudukan. Ketersediaan data, serta keterjangkauan lokasi bagi peneliti juga menjadi pertimbangan utama agar penelitian dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya kepemilikan dokumen

kependudukan, selain sebagai tanda keabsahan sebagai warga negara, e-KTP sangat dibutuhkan ketika mengakses pelayanan publik. Program Lantera ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses layanan dokumen kependudukan, khususnya e-KTP, terutama di daerah terpencil atau dengan akses terbatas. Efektivitas program ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya yang memadai, perencanaan yang baik, koordinasi antara dinas terkait, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pelayanan e-KTP melalui program Layanan Terpadu Admindex (Lantera) dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Layanan Terpadu Admindex (Lantera) dalam Pelayanan E-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, kepemilikan e-KTP terus mengalami peningkatan secara persentase setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. Oleh karena itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana efektivitas Program Layanan Terpadu Admindex (Lantera) dalam Pelayanan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2024?".

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas program Layanan Terpadu Admindex (Lantera) dalam pelayanan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022-2024.

D. Tinjauan Teori

Efektivitas Program

Menurut Campbell dalam (Fitriani et al., 2024) efektivitas program dapat dijalankan

dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian dalam (Islami & Armiati, 2020) efektivitas program pada dasarnya menunjukkan tingkat ketercapainnya hasil dari suatu program, sedangkan jika dilihat dari arti efisiensi lebih kepada bagaimana cara mencapai hasil dengan maksimal tetapi dengan sumber daya yang minimal dengan membandingkan antara output dan inputnya. Efektivitas ini menunjukkan ketercapaian dari berbagai segi dan tercapainya atau sasaran yang telah dirancang tersebut. Jika hasil tersebut mendekati sasaran atau tujuan maka semakin tinggi pula efektivitasnya.

Hani Handoko dalam (Jibril, 2017) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Berikut beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah efektivitas program menurut Campbell dalam (Mutiarin & Zaenudin, 2014), adapun pengukuran efektivitas program secara umum yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Indikator ini mengukur sejauh mana program yang dijalankan mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan program mencerminkan seberapa efektif pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan utama yang telah ditentukan sebelumnya. Aspek ini menilai apakah serangkaian aktivitas yang dijalankan mampu memberikan hasil sesuai ekspektasi, baik dari sisi kuantitas maupun dampaknya secara menyeluruh. Selain capaian angka, aspek keberhasilan juga

dilihat dari kemudahan akses, percepatan layanan, serta dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dalam pelayanan publik, keberhasilan ini menjadi tolak ukur utama apakah program benar-benar bermanfaat dan mampu menyelesaikan masalah yang ada.

2. Keberhasilan Sasaran

Indikator ini fokus pada tercapainya target spesifik yang ditentukan dalam perencanaan program. Sasaran tersebut bisa berupa jumlah penerima manfaat, wilayah intervensi, atau kelompok tertentu yang menjadi prioritas. Evaluasi terhadap keberhasilan sasaran bertujuan untuk menilai ketepatan dan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Semakin tepat sasaran yang dicapai, semakin tinggi pula nilai efektivitas dari program tersebut. Misalnya, pada program administrasi kependudukan, indikator ini mengukur seberapa besar jumlah warga yang sebelumnya sulit dijangkau kini telah terlayani.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan masyarakat terhadap program merupakan cerminan langsung dari kualitas layanan yang diberikan. Penilaian ini menggambarkan sejauh mana harapan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui pelaksanaan program. Masyarakat yang merasa puas cenderung memiliki persepsi positif terhadap penyelenggara layanan dan lebih mungkin mendukung kelanjutan program ke depan. Tingkat kepuasan ini bisa diukur melalui tanggapan langsung warga, survei, atau observasi terhadap proses layanan. Oleh karena itu, indikator ini sangat penting dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. Tingkat *input* dan *output*

Perbandingan antara *input* yang diberikan dan *output* yang diterima merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program. Jika *output* yang diterima lebih besar dibandingkan *input* yang diberikan maka dapat dikategorikan bahwa program efektif dijalankan. Dan juga sebaliknya jika *output* lebih kecil dibandingkan *input* maka aktivitas atau program tersebut dapat dikatakan belum efektif.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Kebijakan suatu program dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai tujuan secara menyeluruh, termasuk bagaimana organisasi menjalankan tugasnya berdasarkan kemampuan operasional.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry* atau *field study* (Abdussamad, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winarta dalam (Ridwan et al., 2021) menjelaskan bahwa metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berisi proses analisis, penggambaran serta ringkasan atas berbagai kondisi yang diambil dari kumpulan informasi yang berasal dari hasil wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan terhadap masalah yang sedang diteliti.

F. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi terhadap efektivitas suatu program merupakan langkah penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dirancang dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, efektivitas program Layanan Terpadu Administrasi Kependudukan (Lanter) di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi fokus analisis, mengingat perannya yang strategis dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan program ini, digunakan teori efektivitas dari Campbell yang mencakup lima indikator utama, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Kelima

indikator ini akan digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah program Lantera telah berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan Program Layanan Terpadu Adminduk (Lanter) dalam pelayanan e-KTP dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang berhasil melakukan perekaman dan penerbitan e-KTP secara lebih cepat dan mudah. Melalui pendekatan jemput bola, petugas Disdukcapil aktif mendatangi masyarakat yang khususnya di daerah terpencil. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perekaman dan pencetakan e-KTP juga membantu mempercepat proses administrasi serta meningkatkan transparansi layanan. Dengan tersedianya e-KTP bagi lebih banyak warga, akses mereka terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan bantuan sosial, menjadi lebih mudah dan lancar. Keberhasilan program ini juga didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan ketersediaan blanko e-KTP serta sarana pendukung lainnya. Dengan adanya Lantera, kesenjangan dalam kepemilikan e-KTP dapat dikurangi secara signifikan, sehingga setiap warga negara dapat memiliki identitas resmi yang sah sebagai bentuk perlindungan hak sipil mereka.

Tabel 3. Persentase kepemilikan e-KTP

2022	2023	2024
Persentase	Persentase	Persentase
95,70%	97,10%	98,17%

Sum

ber: Data olahan Peneliti tahun 2025

Tabel 3 menunjukkan persentase kepemilikan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentase penduduk yang telah memiliki e-KTP sebesar 95,70%. Angka ini meningkat menjadi 97,10% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 98,17% pada tahun 2024. Kenaikan persentase ini

mencerminkan upaya yang konsisten dari pihak terkait dalam meningkatkan cakupan administrasi kependudukan, serta menunjukkan keberhasilan program pelayanan e-KTP kepada masyarakat. Peningkatan yang secara konsisten ini mencerminkan telah adanya upaya dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendorong masyarakat untuk melakukan perekaman dan memperoleh dokumen identitas resmi. Walaupun angka tersebut menunjukkan tren yang positif, pencapaian ini masih belum memenuhi target ideal yang ditetapkan Disdukcapil sebesar 98,25%.

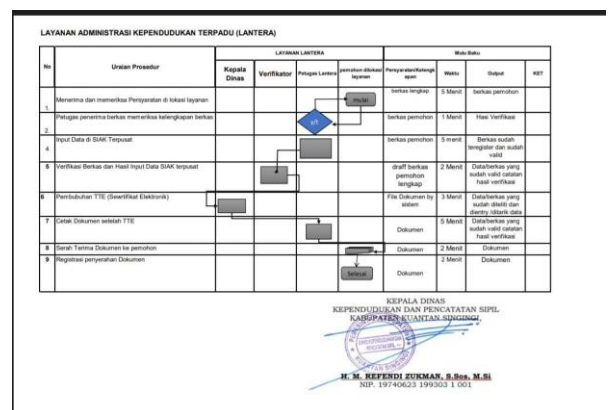
Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan yang lebih intensif dan berkelanjutan guna memastikan seluruh penduduk wajib e-KTP benar-benar terdata dan memiliki dokumen kependudukan yang sah. Pelayanan yang lebih terintegrasi dan praktis memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya cukup lama. Selain itu, adanya program ini juga mendorong peningkatan jumlah pengurusan e-KTP, karena akses pelayanan yang lebih cepat dan mudah membuat masyarakat lebih termotivasi untuk segera melengkapi dokumen kependudukan mereka. Ini menunjukkan bahwa output program, yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, berhasil tercapai.

Pada dasarnya, program ini belum bisa dikatakan terlalu berhasil. Meskipun terdapat kenaikan dalam jumlah kepemilikan e-KTP, angka tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan, sehingga belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan kepemilikan e-KTP. Program ini belum mampu menjamin pemerataan distribusi e-KTP di seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan dalam implementasi agar dapat menjawab tantangan yang ada dan memastikan keberhasilan yang lebih optimal di masa depan.

Keberhasilan program, sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas Campbell, merujuk pada sejauh mana pelaksanaan kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah

direncanakan. Dalam hal ini, program Lantera menunjukkan keberhasilan yang nyata melalui tercapainya kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Proses yang lebih cepat, integrasi antar layanan yang lebih baik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurus e-KTP merupakan bukti bahwa tujuan program mulai terwujud secara konkret. Ini mencerminkan bahwa desain program tidak hanya tepat, tetapi juga berhasil diimplementasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan lapangan. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa secara operasional, program Lantera telah berada pada jalur yang efektif dan relevan.

Gambar 2. SOP Pelayanan Lantera



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi

SOP Layanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Lantera) ini menjelaskan alur pelayanan mulai dari verifikasi berkas oleh petugas di lokasi layanan hingga dokumen diterima oleh pemohon. Prosesnya mencakup input data ke sistem SIAK, verifikasi data, penerbitan TTE (Tanda Tangan Elektronik), pencetakan dokumen, hingga penyerahan akhir. Total waktu layanan relatif singkat, sekitar 25 menit jika seluruh berkas lengkap dan tidak ada kendala, menunjukkan bahwa prosedur ini dirancang untuk memberikan pelayanan cepat, efisien, dan terstruktur. Pelaksanaan SOP ini juga menunjukkan pembagian tugas yang jelas antara petugas lokasi, verifikasi, dan kepala dinas, sehingga memperkecil risiko kesalahan atau keterlambatan dalam proses pelayanan. Selain itu, penggunaan sistem elektronik (SIAK dan

TTE) membantu meningkatkan akurasi data dan efisiensi waktu. Dengan alur yang sistematis dan waktu layanan yang singkat, SOP ini mendukung tujuan program Lantera dalam memberikan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil.

Keberhasilan program Lantera dalam mencapai tujuannya dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut dengan adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Proses evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu dalam menilai efektivitas dan efisiensi program, serta menemukan area yang perlu diperbaiki. Dengan adanya *feedback* dari masyarakat dan petugas, program ini dapat terus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Keberlanjutan program Lantera menjadi sangat penting, mengingat kebutuhan akan administrasi kependudukan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kompleksitas pelayanan publik lainnya.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran Program Layanan Terpadu Adminduk (Lanter) dalam pelayanan e-KTP dapat dilihat dari terpenuhinya target perekaman dan penerbitan e-KTP bagi masyarakat, khususnya masyarakat di daerah terpencil. Program Lantera ini juga membantu mengurangi angka kepemilikan dokumen kependudukan yang rendah dengan memastikan setiap warga yang memenuhi syarat, memiliki e-KTP sebagai identitas resmi. Dengan tercapainya sasaran ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang membutuhkan e-KTP sebagai syarat utama. Keberhasilan Lantera dalam mencapai sasarnya menunjukkan efektivitas program dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih inklusif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan sasaran berarti program harus dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan sasaran yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program layanan terpadu mampu meningkatkan capaian kepemilikan e-KTP, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam teori efektivitas Campbell, keberhasilan sasaran merujuk pada sejauh mana suatu program mampu menjangkau target populasi dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target 98,25%, capaian kepemilikan e-KTP saat ini sebesar 98,17% menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam menjangkau masyarakat. Dalam perspektif Campbell, indikator keberhasilan sasaran dapat tetap dinilai positif apabila program terbukti menjangkau kelompok sasaran dengan baik, mempermudah akses layanan, dan menunjukkan peningkatan hasil. Dengan demikian, capaian 98,17% ini tetap merepresentasikan efektivitas program dalam menjawab kebutuhan sasaran, terutama masyarakat terdorong lebih aktif mengurus administrasi kependudukan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran spesifik terhadap program, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kendala Program Lantera

Kendala
- Kendala waktu yang tidak tepat
- Kendala teknis jaringan
- Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan

Sumber: Data olahan Peneliti tahun 2025

Salah satu kendala yang muncul adalah waktu pelaksanaan program yang kurang tepat. Hal ini terjadi ketika jadwal pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang dapat diakses oleh masyarakat, misalnya pada hari kerja saat sebagian besar masyarakat sibuk bekerja. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat bisa menghadiri jadwal yang telah ditentukan, yang pada akhirnya mempengaruhi

pencapaian sasaran program. Penjadwalan ulang atau penambahan jam operasional bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Sementara itu pada kendala teknis jaringan, seperti gangguan sinyal atau masalah pada sistem server, bisa menghambat kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Proses pengolahan data e-KTP yang memerlukan koneksi internet yang stabil, dapat terhenti atau tertunda jika terjadi gangguan jaringan. Hal ini tentunya berisiko menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan mempengaruhi efektivitas pelayanan. Penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan atau mempersiapkan sistem cadangan apabila terjadi gangguan.

Selanjutnya, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur pelayanan atau mekanisme pendaftaran. Mereka mungkin tidak tahu langkah-langkah yang harus diikuti, tempat yang harus dikunjungi, atau dokumen yang perlu disiapkan. Ketidapahaman ini bisa menyebabkan keraguan atau keterlambatan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang prosedur layanan untuk mengurangi kebingungan masyarakat.

Program Lantera secara mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan menyentuh berbagai lapisan, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas dalam pelayanan publik yang menekankan pentingnya program mampu memenuhi kebutuhan populasi yang menjadi targetnya. Dengan pendekatan yang terintegrasi, seperti pelayanan jemput bola dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pendaftaran, instansi pelaksana mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perekaman dan penerbitan e-KTP.

Keberhasilan ini juga mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program nasional. Selain itu, peningkatan angka kepemilikan e-KTP menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

dokumen identitas sebagai akses utama dalam berbagai layanan publik. Upaya untuk terus meningkatkan angka kepemilikan e-KTP tetap menjadi prioritas ke depan, agar seluruh masyarakat dapat terdata secara resmi dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan masyarakat terhadap Program Layanan Terpadu Adminduk (Lantera) dalam pelayanan e-KTP terlihat dari semakin banyaknya warga yang merasa terbantu dengan proses perekaman dan penerbitan e-KTP yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan adanya program Lantera, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan. Keberhasilan Lantera dalam memberikan kemudahan dan kepastian layanan administrasi kependudukan membuktikan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan layanan yang inklusif dan berkualitas.

Kepuasan terhadap program merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas suatu kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas Campbell. Indikator ini mencerminkan sejauh mana program mampu memenuhi harapan, kebutuhan, dan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Dalam pelaksanaan program Lantera, tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa secara umum kualitas fasilitas pelayanan yang disediakan telah memberikan kenyamanan dan kemudahan selama proses pengurusan administrasi kependudukan, khususnya e-KTP. Fasilitas seperti ruang tunggu yang memadai, serta sarana penunjang yang berfungsi dengan baik menjadi unsur yang sangat penting dalam membentuk kesan positif masyarakat terhadap program ini.

Penilaian masyarakat terhadap fasilitas yang “cukup nyaman” dan “memadai” mengindikasikan adanya keberhasilan penyedia layanan dalam memperhatikan aspek kenyamanan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini penting, mengingat kepuasan tidak hanya

dipengaruhi oleh kecepatan layanan, tetapi juga oleh suasana dan kondisi fisik tempat pelayanan dilakukan. Kenyamanan fasilitas yang dirasakan masyarakat mendorong munculnya persepsi positif terhadap pemerintah daerah sebagai penyelenggara program, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023



Sumber: Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 yang mencapai angka 90,98. Angka ini tergolong tinggi dan mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap berbagai bentuk layanan administrasi kependudukan, termasuk pelayanan melalui Program Lantera, yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan langsung di tempat domisili mereka.

Gambar 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024



Sumber: Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kemudian pada tahun 2024, IKM meningkat menjadi 92,05 yang menandakan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa upaya pembenahan layanan, perluasan akses, dan pemanfaatan teknologi oleh Disdukcapil berhasil meningkatkan persepsi positif masyarakat. Hal ini juga memperkuat bahwa Program Lantera berkontribusi terhadap kepuasan publik, khususnya dalam pelayanan yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil secara langsung dan efisien.

Perbandingan antara IKM tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya tren peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi. Kenaikan skor IKM ini mencerminkan bahwa perbaikan yang dilakukan, baik dari sisi kecepatan layanan, kemudahan akses, maupun kualitas pelayanan, dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika pada tahun 2023 pelayanan melalui Program Lantera sudah dianggap baik, maka pada tahun 2024 program tersebut dinilai semakin efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan IKM ini juga dapat mencerminkan hasil dari evaluasi dan perbaikan internal yang dilakukan oleh Disdukcapil, seperti peningkatan kompetensi petugas, digitalisasi layanan, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa adanya keberlanjutan dan konsistensi dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang pada

akhirnya berdampak positif terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Tingginya nilai IKM ini memperkuat bahwa pendekatan yang diambil oleh program tersebut telah berjalan efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudahan akses, waktu pelayanan yang efisien, serta pendekatan langsung ke masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong tingginya kepuasan ini. Dengan demikian, keberadaan program Lantera turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang tercermin dari persepsi positif masyarakat sebagaimana tergambar dalam nilai IKM tersebut.

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan atau ketepatan layanan semata, tetapi juga oleh suasana, kenyamanan, dan kondisi fisik tempat pelayanan dilaksanakan. Fasilitas yang memadai dan suasana yang nyaman akan menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat. Ketika masyarakat merasa nyaman dan dihargai dalam menerima pelayanan, maka persepsi positif terhadap pemerintah sebagai penyelenggara program akan terbentuk secara alami. Hal ini secara tidak langsung memperkuat legitimasi kebijakan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program yang dijalankan.

Faktor kepuasan ini juga tidak terlepas dari pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Transparansi ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat bahwa data pribadi mereka dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, selain dari segi kualitas layanan yang diberikan, aspek transparansi juga menjadi kunci utama dalam menciptakan kepuasan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga keberhasilan program Lantera dapat dijaga dan terus diperbaiki.

4. Tingkat Input dan Output

Tingkat input dan output dalam Program Layanan Terpadu Adminduk (Lantera) untuk pelayanan e-KTP mencerminkan

efektivitas program dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Dari sisi input, program ini melibatkan alokasi anggaran, tenaga kerja Disdukcapil, sarana pendukung seperti mobil layanan keliling, perangkat perekaman, dan pencetakan e-KTP, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi. Pendekatan jemput bola dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, desa, serta masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung pelaksanaan program. Dari sisi output, Lantera berhasil meningkatkan jumlah warga yang telah melakukan perekaman dan penerbitan e-KTP.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Lantera, diperlukan analisis terhadap tingkat input dan output yang dihasilkan. Input mencakup segala sumber daya yang digunakan, seperti tenaga kerja serta alokasi anggaran. Sementara output mengacu pada hasil nyata yang dicapai dari pelaksanaan program, seperti jumlah dokumen kependudukan yang berhasil diterbitkan atau jumlah masyarakat yang terlayani. Melalui perbandingan antara input dan output ini, dapat dilihat sejauh mana efisiensi program berjalan dalam menjangkau target sasaran.

Tabel 5. Input dan Output Program Lantera Tahun 2022-2024

Input		Output
Tenaga Kerja	Anggaran per Tahun	Capaian e-KTP
8 Orang	Rp18 juta	22.477

Sumber: Data olahan Peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan program Lantera, terdapat 8 orang tenaga kerja yang dilibatkan dengan total anggaran sebesar Rp18.000.000,00. Dari alokasi input tersebut, program berhasil mencetak sebanyak 22.477 e-KTP sepanjang tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki efisiensi kerja yang cukup

baik, di mana jumlah sumber daya manusia dan dana yang tersedia mampu menghasilkan output dalam jumlah signifikan. Namun, capaian tersebut belum mencapai hasil maksimal yang dapat diraih. Dari sisi persentase, program ini berhasil meningkatkan kepemilikan e-KTP sebesar 1,40% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 95,70% menjadi 97,10%. Meskipun peningkatan ini terlihat kecil secara persentase, dalam konteks administrasi kependudukan yang cakupannya luas, angka ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini juga menunjukkan hasil positif, dengan masyarakat merasa terbantu oleh pelayanan yang lebih cepat dan praktis.

Dengan mempertimbangkan jumlah petugas dan anggaran yang digunakan, serta hasil yang dicapai dalam bentuk peningkatan kepemilikan e-KTP dan kepuasan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa program Lantera menunjukkan efektivitas yang cukup baik, meskipun output yang dihasilkan belum bisa mencapai potensi maksimal yang dapat diraih.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh dalam suatu program adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana program berhasil mencapai hasil yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Indikator ini mencerminkan tingkat kepuasan penerima manfaat, sejauh mana program Lantera ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, serta keterjangkauan dan aksesibilitas layanan bagi kelompok sasaran. Selain itu laporan pelaksanaan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam teori efektivitas Campbell, pencapaian tujuan menyeluruh merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan program secara komprehensif, yaitu ketika semua komponen dan pihak yang terlibat dapat memahami serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan program. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, program Lantera telah menunjukkan bahwa baik petugas maupun

masyarakat telah memahami secara cukup baik tujuan dari program ini, yakni mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Pemahaman ini merupakan fondasi penting dalam mencapai sinergi pelaksanaan, karena ketika seluruh pihak memiliki kesadaran yang sama terhadap tujuan program, maka proses implementasi akan berjalan lebih efektif dan terarah.

Kendala seperti gangguan teknis jaringan dan kurangnya pemahaman di awal pelaksanaan memang tidak dapat dihindari dalam suatu program baru. Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari ketiadaan hambatan, melainkan juga dari kemampuan mengatasinya. Dalam hal ini, pendampingan aktif dari petugas serta proses adaptasi masyarakat menunjukkan respons positif terhadap perbaikan dan keberlanjutan program. Lebih jauh lagi, adanya upaya berkelanjutan seperti evaluasi rutin, pengembangan kualitas layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya menunjukkan bahwa program ini tidak bersifat statis, tetapi terus berprogres menuju capaian yang lebih optimal. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, petugas teknis, hingga masyarakat sebagai penerima layanan, menjadi kunci dalam mendukung tercapainya tujuan program secara menyeluruh. Ketika seluruh elemen memahami arah kebijakan dan saling bersinergi dalam pelaksanaannya, maka dampak dari program tidak hanya bersifat teknis dan jangka pendek, tetapi dapat menguatkan fondasi administrasi pemerintahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan Lantera dalam membangun kesadaran bersama terhadap pentingnya e-KTP menunjukkan bahwa program ini telah bergerak menuju pencapaian tujuan menyeluruh yang diharapkan.

Tabel 6. Jumlah e-KTP yang Belum Terpenuhi

Sisa Jumlah Wajib e-KTP (jiwa)		
2022	2023	2024
10.676	7.416	4.852

Sumber: Data olahan Peneliti tahun 2025

Meskipun terlihat adanya penurunan jumlah wajib e-KTP dari 10.676 pada tahun 2022 menjadi 7.416 di tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 4.852 pada tahun 2024, yang menandakan adanya progres positif dari tahun ke tahun, namun pencapaian ini belum dapat dikatakan optimal. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya percepatan perekaman e-KTP melalui Program Lantera telah memberikan dampak yang nyata. Akan tetapi, masih terdapat ribuan masyarakat yang belum melakukan perekaman, yang berarti masih ada target yang belum tercapai secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun efektivitas program dalam menjangkau masyarakat semakin terlihat, tetap diperlukan strategi lanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal, terutama untuk mengejar sisa jumlah wajib e-KTP yang belum terpenuhi hingga tahun 2024.

Indikator pencapaian tujuan menyeluruh dari Program Lantera dapat dilihat dari sejauh mana program ini mampu memenuhi target utamanya, yaitu memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari pusat pelayanan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan dan waktu pelayanan yang kurang tepat. Meskipun demikian, jika dilihat dari target besar dan luaran yang dicapai, program ini secara umum dapat dikatakan telah mendekati tujuan menyeluruh yang ingin dicapai. Target yang belum tercapai diharapkan bisa terpenuhi di masa yang akan datang.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan capaian dan tren penurunan jumlah wajib e-KTP yang belum terpenuhi dari tahun ke tahun, serta peningkatan signifikan persentase kepemilikan e-KTP, dapat disimpulkan bahwa Program Lantera ini tergolong efektif dalam meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Efektivitas ini terlihat dari keberhasilan program menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perekaman e-KTP. Meskipun masih terdapat hambatan teknis dan sosialisasi, namun pencapaian target secara kuantitatif menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak nyata.

Program ini berhasil menjangkau masyarakat luas dengan menggunakan pendekatan jemput bola serta memanfaatkan teknologi digital dalam sistem perekaman dan pencetakan e-KTP. Program ini mampu memberikan kenyamanan dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam memperoleh e-KTP. Dari sisi efisiensi, anggaran yang dialokasikan untuk program ini juga menghasilkan output yang signifikan. Dengan jumlah anggaran yang cukup, program ini berhasil meningkatkan kepemilikan e-KTP secara efektif dan mengurangi angka ketidakpastian dalam pencatatan administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa program Lantera tidak hanya sukses dalam pencapaian teknis, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal kemudahan akses layanan publik. Dengan perbaikan berkelanjutan pada aspek pelaksanaan teknis dan edukasi kepada masyarakat, efektivitas program ini berpotensi lebih optimal di masa mendatang.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk pengembangan lebih lanjut terhadap program Lantera:

1. Sosialisasi

Meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi Program Lantera kepada

masyarakat secara menyeluruh, baik melalui media sosial, spanduk, radio lokal, maupun langsung melalui perangkat desa dan kecamatan. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat, jadwal, dan prosedur pelayanan jemput bola yang diberikan, sehingga partisipasi masyarakat dalam perekaman dan kepemilikan e-KTP dapat lebih optimal. Dengan informasi yang tersampaikan dengan baik, hambatan karena kurangnya pengetahuan masyarakat bisa diminimalisir, dan tujuan program bisa tercapai lebih maksimal.

2. Perbaikan Infrastruktur dan Teknologi
Mengingat adanya kendala berupa gangguan jaringan, disarankan untuk melakukan peningkatan infrastruktur teknologi yang mendukung kelancaran program, seperti penyediaan jaringan yang lebih stabil dan penggunaan perangkat yang lebih modern.

H. Daftar Pustaka

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Osborne, D., & Plastrik, P. (2001). *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: PPM.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (3rd ed.). CV. Alfabeta.

Skripsi dan Jurnal

- Aceh, S. W. R. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) dalam Pengadaan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai*.
- Aini, N., & Rachman, T. (2020). *Implementasi Sistem Administrasi*

Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya - Papua. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 02(01), 10–26. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/249>

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 1104–1116.
- Auliak, N. P., & Hardjati, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(1), 67–75. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11607>
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41.
- Barat, H. (2018). Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik 2018. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, 1–11.
- Christanty, N. G. (2021). *Efektivitas Pelayanan Perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*.
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510–517.
- Fitriani, Jumaidi, & Noorahman, M. F. (2024). *Efektivitas Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 1(1), 97–104.
- Hadi, M. G. M. (2019). *Efektifitas Pelayanan Perekaman E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

- Kabupaten Lombok Timur 2018.
- Ikhsan, N., Aksa, A. N., & Ma'ruf, A. (2018). Tata Laksana E-Procurement Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 309. <https://doi.org/10.26618/kjap.v4i3.1647>
- Indrayani, F. K. (2017). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–12.
- Islami, H., & Armianti, A. (2020). Efektivitas Penggunaan Modul Pembelajaran Berbasis Kontekstual Pada Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Literature Review. *Jurnal Ecogen*, 3(4), 498. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i4.10502>
- Jibril, A. (2017). Efektivitas Program Perpuseru Di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 1–8.
- Kholili, A. N., & Sulthony, M. (2024). Perancangan Sistem Informasi Desa berbasis Mobile dengan konsep Government To Citizen. *Intech*, 5(1), 22–27. <https://doi.org/10.54895/intech.v5i1.2474>
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11, 101–112. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>
- Putria, E. (2021). *Efektivitas Pelayanan E-KTP Melalui Aplikasi SIBISA*.
- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No .(1), 6.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. *Kinerja*, 18(4), 590–598. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>